

**SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan




Diajukan oleh

Achmad Adhipatria P. K

NIM. 08.93.0021

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGRIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2010**

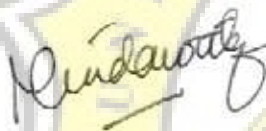
	<b>PERPUSTAKAAN</b>
NO. INV : 194 / S <sub>2</sub> / MHK CG	
TGL : 17/04 '12	
PARAF : <i>vf</i>	

**SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS**

diajukan oleh  
Achmad Adhipatria P.K  
NIM. 08.93.0021

Telah disetujui oleh :

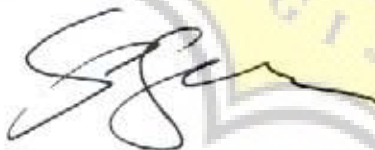
Pembimbing Utama



Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., M.Hum.

Tanggal : 30 oktober 2010

Pembimbing Pendamping



dr. Sofwan Dahlan, SpF.

Tanggal : 30 oktober 2010



## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : ACHMAD ADHIPATRIA P.K

Nim : 08.93.0021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 11 November 2010

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. P. Lindawati S. Sewu, SH., MHum

2. Dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)

3. Endang Wahyati, SH., MH

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 11 November 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrohim,*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahNya penulis dapat mengikuti Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata. Atas rahmatNya pula, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam program pendidikan ini.

Tidak dapat dipungkiri, tesis ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan sampai saat ini.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., M.Hum. dan Bapak Sofwan Dahlan, dr., SpF selaku tim pembimbing atas kesabaran dan ketekunannya dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, bimbingan, saran, kritik dan koreksi yang sangat membantu penulis khususnya dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Endang Wahyati, SH., MH selaku penguji yang sejak awal pengajuan proposal, sangat membantu penulis dengan memberikan berbagai pengarahan,

bimbingan dan koreksi yang sangat membangun dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada seluruh staf pengajar dan staf administrasi dan tata usaha Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan penulis di dalam program pendidikan ini.

Kepada rekan sejawat dan rekan seperjuangan, penulis ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, pengertian, kerjasama dan pertemanan, serta solidaritas saling bahu membahu dalam menyelesaikan program pendidikan ini. Semoga tali silaturahmi yang telah kita bangun, tidak terputus sampai disini.

Kepada seluruh keluarga, Ayah, Ibu dan kedua adik tercinta penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungannya selama hidup penulis, khususnya saat menjalani program pendidikan ini, serta atas doanya yang tulus demi yang terbaik dalam hidup penulis. Terimakasih penulis ucapkan pada Sekar Ayu Paramita khususnya, dan kepada seluruh teman angkatan VI Magister Hukum Kesehatan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberikan berkah dan rahmat serta perlindunganNya di setiap waktu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang tanpa bantuannya penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Subhanahu

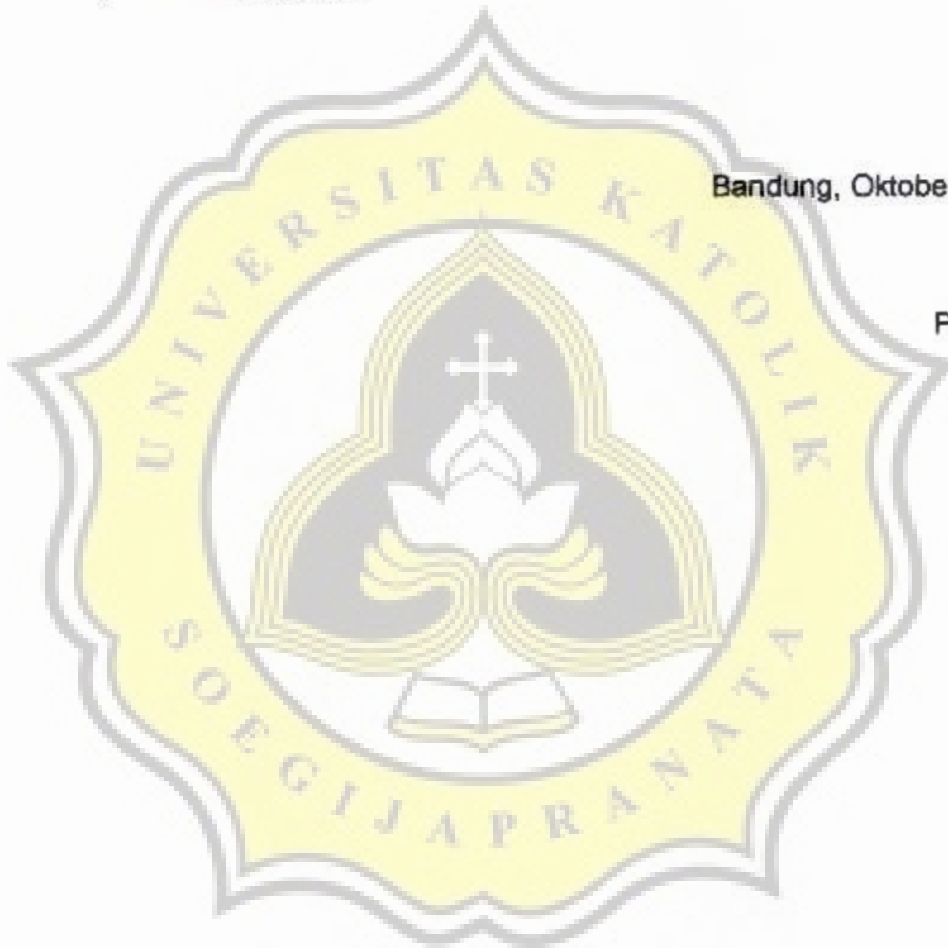
Wata'ala selalu memberikan perlindungan dan membalas budi baik Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam tesis ini. Kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih.

Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Oktober 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	vi
Pernyataan Keaslian.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	17
6. Penyajian Tesis.....	17
7. Penutup.....	18

### **BAB II SISTEM INFORMASI KESEHATAN**

A. Sistem Kesehatan Nasional.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pasien.....	26
C. Rekam Medik dalam Sistem Informasi Kesehatan.....	29
1. Pengertian umum.....	29
2. Tujuan dan Kegunaan Rekam Medik.....	29
3. Peranan Rekam Medik dan Kerahasiaannya pada Penyakit HIV/AIDS.....	36
D. Sistem Informasi Kesehatan pada Penyakit HIV/AIDS.....	37

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM**

A. Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS.....	43
1. Tujuan Hukum.....	43
2. Hak dan Kewajiban di dalam Hukum.....	46

4. Pengertian Perlindungan Hukum .....	51
B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Upaya Kesehatan .....	54
1. Penularan penyakit HIV/AIDS .....	58
2. Upaya pencegahan penularan penyakit melalui transfusi darah .....	60
3. Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit HIV/AIDS melalui Sosial .....	62
4. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Penularan HIV/AIDS .....	63
C. Peraturan Perundang-Undangan dalam Permasalahan Penyakit Menular HIV/AIDS .....	67
1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	67
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	69
3. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 .....	70
4. Kepmenkes RI Nomor. 622/Menkes/SK/VII/1992 .....	69
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular .....	69
6. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	72
7. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	75
D. Hak Asasi Manusia .....	76
1. Hak untuk Hidup .....	77
2. Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan .....	78
3. Hak untuk Mengembangkan Diri .....	78
4. Hak Keadilan/Hak Memperoleh Keadilan .....	79
5. Hak Kemerdekaan/Hak Kebebasan Pribadi .....	79
6. Hak atas Kebebasan Informasi .....	80
7. Hak Keamanan .....	80
8. Hak Kesejahteraan .....	79
9. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan .....	79
10. Hak Wanita .....	82
11. Hak Anak .....	82
E. Hak Asasi Manusia dalam Permasalahan Sosial Penyakit HIV/AIDS .....	83

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Sistem Informasi Kesehatan Pada Penyakit HIV/AIDS .....	87
1. Pencegahan Penularan Penyakit HIV/ AIDS .....	88
a. HIV/AIDS dalam Ruang Lingkup Internasional .....	88
b. HIV/AIDS dalam Ruang Lingkup Nasional .....	88
c. Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS .....	90



d. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penularan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia .....	91
B. Hak Asasi Manusia dan HIV/AIDS .....	98
C. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS .....	99

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
----------------------------	------------



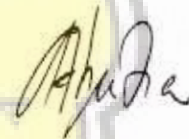
## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, Achmad Adhipatria P. K, peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Kristen Soegijapranata, NIM 08.93.21, menyatakan bahwa:

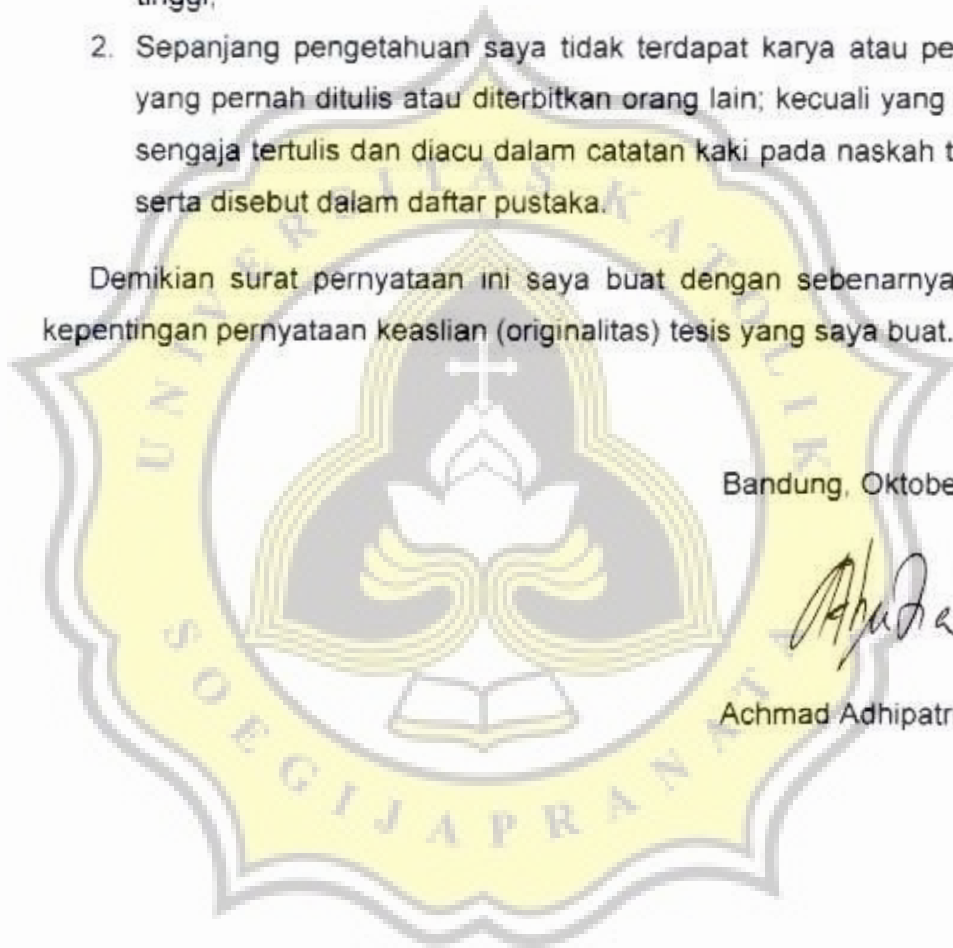
1. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi,
2. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam catatan kaki pada naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Bandung, Oktober 2010



Achmad Adhipatria P. K



## ABSTRAK

Penelitian tesis ini disusun untuk mengetahui bagaimana gambaran Sistem Informasi Kesehatan pada penyakit HIV/AIDS, dan apakah yang disebut dengan perlindungan hukum, serta apakah Sistem Informasi Kesehatan pada penyakit HIV/AIDS dapat menyebabkan tidak dipenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS?

Penelitian Tesis ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, lalu kemudian di analisis secara kualitatif.

Sistem Informasi Kesehatan berperan penting dalam menyediakan informasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Hal ini tercermin dalam Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota yang juga berlaku pada penyakit HIV/AIDS. Namun kondisi sosial di masyarakat menuntut perhatian khusus terhadap penyakit ini. Dampak penyakit dan diskriminasi terhadap penderitanya memunculkan isu-isu tentang hak asasi manusia. Seharusnya diskriminasi harus di hapuskan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang melindungi hak asasi manusia. Diskriminasi merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Merahasiakan identitas dan kondisi kesehatan pasien adalah kewajiban dari penyelenggara layanan kesehatan. Dengan merahasiakan rekam medik pasien HIV/AIDS, maka tujuan perlindungan hukum terhadap pasien yang bersangkutan dapat dipenuhi, namun tujuan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan sekitar pasien menjadi tidak dapat dipenuhi karena masyarakat menjadi berisiko tinggi tertular penyakit HIV/AIDS. Kebijakan Kepmenkes RI Nomor: 622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan darah donor juga menyebabkan masyarakat menjadi berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS. Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini tidak dapat memenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaiknya dalam penanggulangan HIV/AIDS dibuat kebijakan khusus sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya penularan penyakit tersebut. Dengan mempertimbangkan data yang ada dan dampak bagi masyarakat, seharusnya HIV/AIDS di masukkan dalam kategori penyakit wabah.

Kata Kunci: SIK, Asas Perlindungan Hukum, HIV/AIDS, HAM

## ABSTRACT

This study is being done to determine whether Health Information System could protect the community law protection from HIV/AIDS, to find out the Health Information System in HIV/AIDS patients and the meaning of community evaluation of law protection.

This is a descriptive study with normative juridical approach. The data source come from secondary data, which form by primary, secondary and tertiary law products, then the data were analyzed qualitatively.

Health Information System have an important role providing information to solve health problems. This is written in Kepmenkes No. 932/Menkes/SK/VIII/2002 about developing guide on City Health Information System. This system also works for HIV/AIDS. The social condition demand serious attention for this disease. The impact and discrimination for the bearer of the disease result many issues about human rights. The obligation to maintain human rights is written inside the introduction of Undang-Undang Dasar 1945, and also Undang-undang No. 39/1999. To protect the patients identity and health condition is an obligation of the health provider. By protecting the medical record of HIV/AIDS patients, then the purpose of law protection for that patients is fulfilled, but for the opposite, it wont fulfill the purpose of law protection for community. At this rate, the community become fragile from HIV/AIDS infection. The government policy in Kepmenkes RI No. 622/Menkes/SK/VII/1992 about obligation to run HIV/AIDS test to a blood donor by unlink anonymous system makes the community more fragile from HIV/AIDS infection. The Health Information System in Indonesia these day didnt fulfill the law protection for the community. Government need to make a special policy according to the impact of HIV/AIDS disease so the law protection for the community can be fulfill. Considering the factual data and the impact to the community, HIV/AIDS should be categorize as a plague.

Keywords: Health Information System, Law Protection, HIV/AIDS, Human Rights